URGENSI PEMBARUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BANYUWANGI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

SKRIPSI

Oleh

Ajrina Layalie Sabra

NIM. 05040422055

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ajrina Layalie Sabra
NIM	:	05040422055
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul	:	Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017: Analisis Disharmonisasi Perda Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Mei 2026

Yang menyatakan,



Ajrina Layalie Sabra

NIM. 05040422055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ajrina Layalie Sabra

NIM : 05040422055

Judul : Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017: Analisis Disharmonisasi Perda Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 07 Mei 2026

Pembimbing,

Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ajrina Layalie Sabra

NIM. : 05040422055

Judul : Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyāsah Dustūriyah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Penguji II

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

Penguji III

Dr. Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.
NIP. 199901012025052004

Surabaya, 17 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sholihah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ajrina Layalie Sabra
NIM	: 05040422055
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address	: ajrinalayalie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Oktober 2026

Penulis

(Ajrina Layalie Sabra)

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Daerah tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang telah dicabut, sehingga beberapa substansi pengaturannya tidak lagi sesuai dengan paradigma pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersifat komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum optimalnya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana urgensi pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan (2) bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap urgensi pembaruan Peraturan Daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena terdapat disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, baik dari aspek terminologi, materi muatan, maupun pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut tampak pada belum optimalnya pengaturan mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sistem jaminan sosial yang belum mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan, serta belum diakomodasinya perluasan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyah*, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara, sehingga pembaruan Peraturan Daerah menjadi suatu keharusan guna mewujudkan pelindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu segera melakukan pembaruan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dengan menyesuaikan materi muatan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta memperkuat pengaturan mengenai mekanisme pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif. Selain itu, proses pembaruan Peraturan Daerah perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta mampu memberikan kepastian dan pelindungan hukum yang optimal bagi Pekerja Migran Indonesia.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 14
C. Rumusan Masalah 16
D. Tujuan Penelitian 16
E. Manfaat Penelitian 16
F. Penelitian Terdahulu 18
G. Landasan Teori 22
H. Definisi Operasional 29
I. Metode Penelitian 31
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH **35**
A. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 35
1. Definisi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 35
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 42
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 48
1. Pengertian dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 48
2. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 51
C. Teori Perlindungan Hukum 53
1. Definisi Perlindungan Hukum 53
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 56
D. Fiqh *Siyāsah Dustūriyah* 57
1. Definisi *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 57

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

2. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 61
BAB III URGENSI PEMBARUAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI BANYUWANGI AGAR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 67
A. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Banyuwangi 67
B. Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 76
BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP URGENSI PEMBARUAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI BANYUWANGI 94
A. Perlindungan Pekerja Migran dalam Pandangan *Fiqh Siyāsah* 94
B. Tinjauan Fiqh *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 111
BAB PENUTUP 128
A. Kesimpulan 128
B. Saran 129
DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN 139

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Agustinus Sihombing, Ranat Mulia Pardede, Fahmi Amrico, Herman, Eko Murti Saputra, Armansyah, dan Heru Iskhan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.

Edy Sony, Muhammad Saleh Suat, Dr. Indah Kusuma Dewi, Dr. Emy Hajar Abra, Anang Dony Irawan, Agsel Awanisa, Dr. A. Basuki Babussalam, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. CV. Gita Lentera, 2025.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Sidoarjo: Prenadamedia Group, 2013.

Muwahid dan Abdul Kholiq Syafa'at. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Wanita Ilegal di Malaysia Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*. Banyuwangi: Yayasan PP. Darussalam Blokagung, 2021.

Redi, Ahmad. Hukum *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.* Sinar Grafika, 2017.

Romli, Muhamad Sadi Is, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, Tamudin, dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course dan Training, 2024.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, dan Ni Komang Arini Styawati. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

ii. Jurnal/skripsi/Tesis

Abraham Mandala Utama. "Analisis Fihq Siyasah Dusturiyah tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative dan Positive Legislator dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Achmad Muzaki, Zefry Luttadinata, Auliya Eka Putri, Maya Ginti Kirana, Rudhlotun Nur Jannah, Muhammad Daniar Firdaus, dan Mukhamad Rifa'i. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (November 2024): 49.

Ahmad Kemal Jauza Firdaus. "Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Ahwadzy, M. Arfan. "Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (Desember 2025): 163.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Alfian Andri Wijaya. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 11, no. 1 (Juni 2022): 20.

Amanda Graysela Mawikere, Imelda A. Tangkere, dan Stevan O. Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex_Privatum Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (September 2024): 7.

Ari Hermawan dan Supriyadi. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran PPTKIS dalam Pra Penempatan TKI Di Luar Negeri." *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 456.

Arifin. "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Ssitem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015).

Bambang Antariksa. "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Deliberatif* 1, no. 1 (Juni 2017).

Baskoro, Aji. "Breaking the Glass Ceiling for Indonesian Migrant Workers: A Legal-Politcal and Maqasid al-Shariah Analysis of Protection Policies." *Al'Adalah: Journal of Islamic Studies* 27, no. 2 (2024): 155.

Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1: 5.

Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, dan Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (Mei 2021): 671.

Dani Amran Hakim dan Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (Juli 2020).

Dianisa, Tifani Rizki dan Gayatri Dyah Suprobowati. " Penerapan Teori Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Souvereignty: Jurnal Demokarasi dan Ketahanan Nasional 1, No. 2 (2022).

Otong Syuhada. "Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka* 2, no. 2.

Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *EL QONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (June 2025).

Fanggi, Prandy A. L. "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan di Indonesia." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Faqih, Muhammad. " Proses Pembentukan Undang-Undang dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." Mimbar Yustitia 3, No. 2 (Desember 2019).

Fauzi Almubarok. "Keadilan dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018).

Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, dan Indra Perwira. "Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, no. 1 (Juli 2022).

Hasanuddin Hasim. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (Desember 2017).

Irwansyah dan Zenal Setiawan. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (November 2023).

JH. Sinaulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 4, no. 1 (2018).

Jumadi. "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018).

Karunia Hazyimara. "Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an." *Setyaki: Jurnal Studi KeagamaanIslam* 1, no. 1 (2023).

Khairun Umma Marbun, Husni A. Jalil, dan T. Surya Reza. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Maslahah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2024).

Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022).

Kurnisar. "Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum." *Media Komunikasi FIS* 10, no. 2 (Juni 2020): 245.

Luthvi Febryka Nola. "Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Negara Hukum* 11, no. 2 (November 2020): 260.

M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

M. Eza Helyatha Begouvic. "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 62.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan.” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (Juli 2018).

Miftahol Fajar Sodik dan Dimas Bima Setiyawan. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyāsah Dustūriyah dan Fikih Lingkungan (Klaster Lingkungan Hidup).” *Jurnal Daarussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIII, no. 1 (September 2021): 176.

Muhammad Fikri Fachrian Haqi. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Penyiaran Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Muhammad Hendri Yanova, , Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2.

Muhammad Suhenriko. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (Desember 2023): 65.

Musleh, Amilia Rizqi Nur Rosyidah, Umar Faruq, dan M. Saedi. “Urgensi Asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial3* 3, no. 2 (November 2023): 182.

Nisrina Irbah Sati. “Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2019): 839.

Nur Kemala Putri, Alex Simeulu, Fikriya Aniqa Fitri, Irda Trilis, Mulitalia, M. Febrya Adisma. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1.

Nurdiana, Nurul Hak, dan Toha Andiko. “Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 1 (April 2024): 124.

Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany. “Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024).

Qomariah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum." Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 6, No. 1 (Juli 2023).

Rahmawati Muda dan Halimah Basri. “Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Covid-19 perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 2 (Mei 2022).

Ratna Dewi, Ria Fitriah, Vini Novilia, William Gilbert Onsen, dan Yosua Roni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran: Studi Kasus

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Perburuhan dalam Perspektif Hukum Perdata." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024).

Ricky Johanes Sepang, Butje Tampi, dan Marthin Doodoh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Administratum* IX, no. 2 (2021).

Rindu Ulul Ilmi Sugianto, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, dan Muhammad Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 172.

Rizky Dwi Utami. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia." *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli 2022): 270.

Romandelas Manurung dan Gunardi Lie. "Legal Policy on Changes to Copyright Law in the Digital Space: Politik Hukum Atas Perubahan Undang-Undang Hak Cipta di Ruang Digital." *Academia Open* 10, no. 2 (Desember 2025).

Roni Nur Rahman, Budi Ispiyarso, dan F.C. Susila Adiyanta. "Penerapan Parkir Elektronik (E-Parking) di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2709.

Ruslan Sangaji dan Muh. Akbar Amnur. "Prinsip Syūrā dalam Al-Qur'an dan Hadis Serta Penerapannya dalam Sistem Negara Modern (Suatu Analisis Siyāsah Syar'iyah)." *Jurnal Al-Wajid* 5, no. 2 (Desember 2024).

Sanggera Juliska, Djonet Santoso, Yorry Hardayani. "Pelaksanaan Perlindungan Administratif dan Teknis Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri." *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 13, no. 1.

Siti Yulianah M. Yusuf, Dhea Candra Dewi, dan Vidya Yanti Utami. "Peningkatan Pelayanan Publik Bagi Pekerja Migran Melalui Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (Desember 2021).

Stanley Kurniawan. "Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021).

Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, no. 1 (2023).

Sulastri. "Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Terhadap Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Syahputra, Yusuf. “Fiqh Siyasah; Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 5 (Mei 2025).

Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih, Delta Bayu Murti, Rachmah Ida, dan Irfan Wahyudi. “Pemberdayaan Dikalangan Calon Pekerja Migran dalam Rangka Pencegahan Penyakit Menular di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.” *Jejaring Administrasi Publik* 13, no. 1 (2021).

Trinanda, Desip, Yuliandri, dan Khairul Fahmi. “Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (September 2022): 405.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

Wahyu Prianto. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1.

Wahyu Purwidiarso. “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Yaomil Nurhaliza, Abdullah Said, dan Andhyka Muttaqin. “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi).” Tesis, Universitas Brawijaya, 2024.

Yunita Ratna Sari. “Analisis Kebijakan Manfaat Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Jamsostek* 1, no. 2 (Desember 2023).

Yusuf Syahputra. “Fiqh Siyasah; Tinjauan tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 5 (Mei 2025).

Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Negara Hukum* 9, no. 1 (Juni 2018).

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

iv. Data Elektronik

admin labuhanbatu.com. "Peran Penting Pekerja Migran Indonesia (PMI)." Labuhanbatu : Data dan Berita, September 2025. Akses 22 April 2026. https://labuhanbatu.com/2025/09/30/pekerja-migran-indonesia-pmi-sebaran-sektor-dampak-ekonomi-dan-strategi-pelindungan/.

Akol. "Banyuwangi Kembali Masuk Lima Besar Daerah Terbanyak Pengirim Pekerja Migran." Akses 17 April 2026. https://apakabaronline.com/banyuwangi-kembali-masuk-lima-besar-daerah-terbanyak-pengirim-pekerja-migran/.

Alisa Q. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum." akses 25 November 2025 Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/.

Arti Kata "Urgensi" Menurut KBBI. Akses 8 Desember 2025 https://kbbi.co.id/arti-kata/urgensi.

BeritaBwi. "Jenazah PMI Banyuwangi Yang Meninggal di Kamboja Tiba Rumah Duka, Bupati Ipuk: Semoga Ini Yang Terakhir." May 2025. Akses 17 April 2026 https://banyuwangikab.go.id/berita/jenazah-pmi-banyuwangi-yang-meninggal-di-kamboja-tiba-rumah-duka-bupati-ipuk-semoga-ini-yang-terakhir.

Biro Humas Kemnaker. "Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Siapkan 45 LTSA." Kemnaker.Go, February 2021. 23 April 2026

Direktorat Jenderal Penempatan KP2MI. "Rekapitulasi Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Asal Kabupaten Kota PMI." Maret 2025. Akses 17 April 2026. https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/rekapitulasi-jumlah-penempatan-pekerja-migran-indonesia-berdasarkan-asal-kabupaten-kota-pmi-2025.

Hakim, Lukman. "Jatim Penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terbanyak Nasional. IDX Channel." 30 Januari 2023. Akses 19 November 2025. https://www.idxchannel.com/economics/jatim-penyumbang-pekerja-migran-indonesia-pmi-terbanyak-nasional.

Haqi, Muamar. "Pahlawan Devisa dan Pusaran TPPO." inilah.com. 22 April 2025. akses 19 November 2025. https://www.inilah.com/pahlawan-devisa-dan-pusaran-tppo.

Hermawan Arifianto. "Nestapa Pekerja Migran Banyuwangi Di Arab Saudi, 21 Tahun Tidak Digaji Dan Tidak Boleh Pulang Meski Kontrak Habis." Liputan6. Maret 2024. 23 April 2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

https://www.liputan6.com/surabaya/read/5549976/nestapa-pekerja-migran-banyuwangi-di-arab-saudi-21-tahun-tidak-digaji-dan-tidak-boleh-pulang-meski-kontrak-habis.

JDIH Kementerian Keuangan. "Definisi Peraturan Daerah." 8 Desember 2025. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/peraturan-daerah?id=39b0bc2d30ebcbd8e6f68ca174f81a16.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Perkuat Pendirian LTSA, BNP2TKI Adakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi LTSA." Kp2mi.Go.Id. November 2019. akses 23 April 2026. https://kp2mi.go.id/program-detail/perkuat-pendirian-ltsa-bnp2tki-adakan-rapat-koordinasi-dan-evaluasi-ltsa/Layanan%20Terpadu%20Satu%20Atap.

Liputan6.com. "Perjuangan PMI Banyuwangi Menjerat Agen Penyalur Tenaga Kerja Abal-Abal." Juni 2022. Akses 17 April 2026. https://www.liputan6.com/jatim/read/4992298/perjuangan-pmi-banyuwangi-menjerat-agen-penyalur-tenaga-kerja-abal-abal?utm_source.

Novi Husdinariyanto. "Jenazah Pekerja Migran Meninggal di Kamboja Tiba di Banyuwangi." ANTARA Kantor Berita Indonesia. 2025. Akses 23 November 2025. https://www.antaranews.com/berita/4829585/jenazah-pekerja-migran-meninggal-di-kamboja-tiba-di-banyuwangi.

"Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Tahun 2021." Januari 2021. Akses 17 April 2026. https://blkbanyuwangi.kemnaker.go.id/program-pelatihan-balai-latihan-kerja-tahun-2021/.

PT Dewi Pengayom Bangsa. "Perubahan Nama dari TKI ke PMI: Meluruskan Persepsi dan Meningkatkan Martabat Pekerja Migran Indonesia." PT Dewi Pengayom Bangsa. April 2024. Akses 23 April 2026. https://www.dewipengayombangsa.com/news/perubahan-nama-dari-tki-ke-pmi:-meluruskan-persepsi-dan-meningkatkan-martabat-pekerja-migran-indonesia/76.

Reinardus Fariyanto. "Tragedi PMI Banyuwangi di Kamboja: Potret Kelam Perlindungan Pekerja Migran." Mei 2025. Akses 22 April 2026. https://kumparan.com/reinardus-rafiyanto/tragedi-pmi-banyuwangi-di-kamboja-potret-kelam-perlindungan-pekerja-migran-251CvreU6hN/full.

Rimawati, Eka. "Jalan Terjal Perangi TPPO Berkedok Pekerja Migran di Banyuwangi." Detik Jatim. 9 Mei 2025. Akses 23 November 2025https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7906377/jalan-terjal-perangi-tppo-berkedok-pekerja-migran-di-banyuwangi.

Rizki Alfian Restiawan dan Aloysius Gonsaga. "Dua PMI Banyuwangi Alami Gangguan Jiwa Usai Pulang dari Malaysia." KOMPAS.COM Jernih Melihat Dunia, 2024. 23 November 2025. https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/24/100254678/dua-pmi-banyuwangi-alami-gangguan-jiwa-usai-pulang-dari-malaysia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Yonatan, Agnes Z. “10 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak 2023.” GoodStats. 17 Februari 2024. Akses 19 November 2025. https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-2023-IJimq.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/